



EFEKTIVITAS KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PATARUMAN

Ridha Ulfah¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Arlan Siddha³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Pembangunan desa merupakan fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga efektivitas lembaga desa menjadi faktor strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sembilan informan yang terdiri atas anggota BPD dan masyarakat, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pataruman telah melaksanakan fungsi utama secara cukup efektif, meliputi pengawasan penggunaan dana desa, penyaluran aspirasi warga, serta pembahasan peraturan desa bersama pemerintah desa. Keberhasilan tersebut tampak pada meningkatnya transparansi, terakomodasinya aspirasi, dan terjaganya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, dokumentasi administrasi, dan ketidakmerataan realisasi program. Secara keseluruhan, efektivitas kerja BPD berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada aspek infrastruktur, keamanan, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas BPD, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta optimalisasi partisipasi warga untuk mewujudkan tata kelola di pemerintahan desa yang lebih responsif dan akuntabel.

Kata Kunci: Efektivitas Kerja, Badan Permusyawaratan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Desa

Abstract

Village development is a crucial foundation for improving community welfare, making the effectiveness of village institutions a strategic factor. This study aims to analyze the work effectiveness of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in enhancing community welfare in Pataruman Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. A descriptive qualitative approach was employed with nine informants consisting of BPD members and community representatives. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using Miles & Huberman's interactive model involving data reduction, display, and conclusion drawing. The findings indicate that the BPD of Pataruman Village has carried out its main functions effectively, including monitoring village fund management, channeling community aspirations, and deliberating village regulations with the village government. These efforts have strengthened transparency, ensured that citizens' voices are accommodated, and maintained participatory governance. Nevertheless, challenges remain, such as limited resources, incomplete administrative documentation, and uneven implementation of certain programs. Overall, the BPD's work effectiveness has contributed positively to community welfare, particularly in infrastructure development, social security, and economic empowerment. The study suggests the need to strengthen BPD's capacity, improve coordination with the village government, and optimize community participation to realize more responsive and accountable village governance.

Keywords: *Work Effectiveness, Village Consultative Body, Community Welfare, Village Governance*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena desa menjadi basis utama aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi kewenangan luas bagi desa untuk mengatur urusan sendiri, sehingga menuntut tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan desa, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Efektivitas kerja BPD menjadi kunci agar kebijakan pembangunan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga (Steers, 1985; Robbins & Coulter, 2012).

Namun, dalam praktiknya, BPD sering menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa. Kondisi ini juga terlihat di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, yang meski memiliki potensi pembangunan cukup besar, masih menghadapi kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan realisasi

program desa. Dengan total anggaran desa yang signifikan, efektivitas kerja BPD dalam mengawal distribusi kebijakan publik menjadi semakin krusial untuk mencegah ketidaktepatan sasaran program dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana efektivitas kerja BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pataruman? Pertanyaan ini penting mengingat fungsi BPD tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menyangkut representasi politik warga dan jaminan akuntabilitas pemerintahan desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kerja BPD Desa Pataruman dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada indikator efektivitas organisasi menurut Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi sistem, dan kemampuan adaptasi.

Secara akademik, penelitian ini memiliki relevansi dalam memperkaya kajian efektivitas organisasi publik di tingkat desa, yang masih relatif jarang dikaji dibandingkan konteks birokrasi kota atau pemerintah pusat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola desa, khususnya dalam memaksimalkan peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dan saluran representasi masyarakat. Dengan demikian, studi ini mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang cenderung hanya menyoroti pembangunan infrastruktur, tanpa melihat secara komprehensif peran BPD dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan ini karena tujuan utama studi adalah memahami secara mendalam bagaimana BPD bekerja dalam konteks nyata desa—bukan mengukur hubungan kausal dengan angka. Peneliti masuk ke setting alamiah Desa Pataruman,

berinteraksi langsung dengan aktor kunci, dan mendeskripsikan temuan apa adanya berdasarkan pengalaman, praktik, serta proses organisasi di BPD. Hasilnya diharapkan berupa pemahaman yang kaya tentang mekanisme kerja BPD dalam pengawasan, legislasi, serta penyaluran aspirasi dan bagaimana itu berimbas pada kesejahteraan warga.

2. Desain/Metode Penelitian

Desain yang dipakai adalah studi kasus tunggal berfokus pada BPD Desa Pataruman. Batas kasus (case boundary) didefinisikan jelas: lembaga BPD sebagai unit organisasi; rentang waktu kerja lapangan utama Juli–Agustus 2025; serta arena kegiatan yang diamati (rapat BPD, musyawarah desa, pengawasan program, dan layanan publik terkait kesejahteraan). Desain ini memungkinkan peneliti menelusuri proses (bagaimana fungsi dijalankan), aktor (siapa melakukan apa), artefak kebijakan (Perdes, RAPBDes, laporan kinerja), dan hasil antara (transparansi, partisipasi, ketepatan sasaran program) dalam satu ekosistem kelembagaan yang utuh.

3. Subjek/Objek, Unit Analisis, dan Informan

- A. Unit analisis: BPD Desa Pataruman (organisasi dan proses kerjanya).
- B. Objek kajian: efektivitas kerja BPD dalam tiga fungsi utama—pengawasan, penyaluran aspirasi, dan pembahasan/penyepakatan Perdes—serta kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat.
- C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan narasumber secara sengaja berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam aktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun dalam proses pembangunan desa. Jumlah informan sebanyak sembilan orang, yang terdiri dari unsur BPD dan masyarakat Desa Pataruman. Komposisi ini dirancang agar penelitian mampu menangkap perspektif kelembagaan sekaligus suara masyarakat sebagai penerima dampak.

Pertama, Ketua BPD dipilih karena posisinya sebagai pimpinan yang mengetahui arah strategis lembaga, mengoordinasikan anggota, serta memastikan jalannya fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Dari

ketua, peneliti mendapatkan gambaran mengenai visi lembaga, mekanisme koordinasi lintas aktor, serta strategi dalam menjaga akuntabilitas.

Kedua, Sekretaris BPD diikutsertakan karena perannya yang penting dalam administrasi organisasi, penyusunan agenda, pengarsipan notulen rapat, dan pengelolaan dokumen kinerja. Kehadiran sekretaris sebagai informan memberikan perspektif teknis mengenai sistem dokumentasi serta alur komunikasi internal dalam BPD.

Ketiga, dua orang staf atau anggota BPD juga diwawancarai. Mereka dipilih karena memahami teknis pelaksanaan fungsi BPD di lapangan, seperti monitoring program pembangunan, mengelola kanal penyampaian aspirasi masyarakat, serta melakukan tindak lanjut dari keluhan warga. Informasi dari staf ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana keputusan strategis BPD diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari.

Keempat, sebanyak lima orang masyarakat desa dipilih untuk mewakili unsur penerima manfaat pembangunan desa. Pemilihan masyarakat didasarkan pada keragaman usia, pekerjaan, dan latar sosial agar pandangan yang diperoleh lebih beragam. Dari mereka, peneliti menggali pengalaman langsung terkait efektivitas BPD, persepsi tentang keadilan distribusi program, serta tingkat partisipasi dalam forum desa. Dengan melibatkan unsur masyarakat, penelitian ini dapat mengukur sejauh mana fungsi BPD benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Dengan komposisi informan tersebut, penelitian ini memperoleh gambaran yang komprehensif: dari perspektif struktur kelembagaan BPD yang berfokus pada strategi, administrasi, dan teknis pelaksanaan, hingga perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat yang menilai sejauh mana BPD bekerja secara efektif.

Kriteria pemilihan informan: (i) terlibat langsung dalam fungsi BPD atau terdampak kebijakan; (ii) mengetahui proses perumusan/implementasi program; (iii) bersedia memberi informasi dan dapat dihubungi; (iv) mewakili variasi peran (pembuat/pelaksana/penikmat kebijakan).

1. Setting & akses: wawancara dan observasi dilakukan di kantor desa, ruang rapat BPD, lokasi program (mis. penyaluran bantuan/BLT,

perbaikan jalan lingkungan), serta rumah warga bila diperlukan untuk kenyamanan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data (apa yang dilakukan peneliti)

A. Wawancara mendalam (semi- terstruktur).

Peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan inti seputar tiga fungsi BPD (pengawasan, legislasi/Perdes, aspirasi) ditambah probe tentang koordinasi, transparansi, dan dampak bagi warga. Wawancara dilakukan tatap muka (30–60 menit per sesi), direkam menggunakan gawai (dengan persetujuan), disertai catatan lapangan. Contoh tema eksplorasi:

- a) Bagaimana BPD memantau penggunaan dana desa dan menindaklanjuti temuan?
- b) Mekanisme menerima, menyaring, dan memprioritaskan aspirasi warga.
- c) Alur pembahasan Perdes dan jaminan keterlibatan pihak terdampak.
- d) Dampak yang dirasakan warga (akses layanan dasar, infrastruktur, keamanan lingkungan, penguatan ekonomi rumah tangga).

B. Observasi lapangan (non- partisipan dengan sesekali ikut serta).

Peneliti mengamati rapat koordinasi BPD–Pemdes, forum musyawarah warga, kegiatan pengawasan penyaluran bantuan, serta pekerjaan fisik (mis. perbaikan jalan lingkungan). Hal yang dicatat: kehadiran aktor, pola interaksi, alur pengambilan keputusan, respons terhadap keluhan, dan bukti transparansi (papan informasi, notulen yang terbuka, dll.). Observasi didukung dokumentasi foto/foto- lapangan seperlunya.

C. Dokumentasi.

Peneliti mengumpulkan dan memeriksa dokumentasi seperti: notulen rapat BPD/musdes, RAPBDes/APBDes, Perdes yang dibahas/disahkan, Laporan Kinerja BPD, serta bahan sosialisasi/edaran kepada warga. Dokumen dipakai untuk memverifikasi (cross-check) ucapan informan dan jejak keputusan,

sekaligus menelusuri kesinambungan dari perencanaan–pelaksanaan–evaluasi.

D. Catatan lapangan & log penelitian.

Setiap sesi (wawancara/observasi) dicatat waktu/tempat, siapa yang hadir, ringkasan isi, kesan peneliti, dan butir tindak lanjut. Log ini penting untuk menelusuri alur analisis dan validasi.

5. Teknik Analisis Data (langkah kerja nyata)

Analisis dilakukan seiring pengumpulan data (iteratif), mengikuti kerangka Miles & Huberman:

1. Organisasi & transkripsi.

File audio diwujudkan dalam transkrip; dokumen dipilah menurut jenis/fungsi (rapat, anggaran, regulasi); foto diberi keterangan (waktu, lokasi, peristiwa).

2. Reduksi data.

Peneliti menandai segmen relevan dengan tujuan studi: (i) pengawasan, (ii) aspirasi, (iii) Perdes, (iv) bukti dampak pada kesejahteraan (infrastruktur, layanan sosial, keamanan, ekonomi). Segmen yang berulang/kurang relevan disisihkan.

3. Pengodean awal → kategori → tema.

Kode induk diarahkan pada indikator efektivitas (pencapaian tujuan, integrasi/koordinasi, adaptasi). Dari kode, disusun kategori (mis. mekanisme kontrol anggaran; kanal aspirasi; keterbukaan informasi; respons cepat; kendala SDM/dana; praktik kolaborasi). Kategori lalu dirangkum menjadi tema (mis. “pengawasan berbasis bukti”, “partisipasi bermakna vs prosedural”, “bottle-neck implementasi”).

4. Penyajian data (data display).

Temuan disusun dalam narasi sistematis dan matriks ringkas yang mempertautkan sumber (ketua/sekretaris/staf/warga/dokumen) dengan isu (pengawasan, aspirasi, Perdes) dan indikasi dampak (transparansi, ketepatan sasaran, kepuasan warga).

5. Penarikan kesimpulan & verifikasi.

Kesimpulan awal dicek kembali terhadap bukti lain (triangulasi sumber/teknik) dan klarifikasi cepat kepada informan kunci bila ada

bagian yang meragukan (member check singkat). Bagian yang belum kuat dibiarkan sebagai temuan sementara atau keterbatasan.

6. Keabsahan Data & Etika (pendek, praktis)

1. Triangulasi sumber/teknik: membandingkan pernyataan ketua BPD, sekretaris, staf, warga, serta dokumen/notulen.
2. Member check singkat: mengonfirmasi ringkas poin sensitif (mis. mekanisme pengawasan dana, alasan prioritas program) kepada informan kunci.
3. Audit trail ringkas: menyimpan pedoman wawancara, log kunjungan, daftar dokumen, dan versi matriks analisis.

Persetujuan informan: penyampaian tujuan penelitian, izin perekaman, dan opsi anonimisasi kutipan; dokumentasi kesediaan informan disertakan sesuai kebutuhan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Fungsi Pengawasan BPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pataruman aktif mengawasi pengelolaan dana desa, penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Kehadiran anggota BPD dalam distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemantauan perbaikan jalan, hingga pengukuran Tanah Kas Desa memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya berbentuk administratif, tetapi juga keterlibatan langsung. Praktik ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat karena proses berjalan transparan dan akuntabel.

Secara teoritis, temuan ini mendukung indikator pencapaian tujuan dan monitoring dalam teori efektivitas organisasi Steers (1985). BPD berhasil menjalankan fungsi pengawasan yang sejalan dengan tujuan utamanya, yakni memastikan kebijakan desa tepat sasaran. Jika dibandingkan dengan penelitian Siregar (2018) yang menemukan BPD pasif di Deli Serdang, maka BPD Pataruman relatif lebih progresif. Hal ini memberi kontribusi akademik bahwa efektivitas BPD sangat dipengaruhi oleh konteks lokal—budaya partisipasi warga, dukungan pemerintah desa, serta kapasitas individu anggota.

2. Penyaluran Aspirasi dan Partisipasi Warga

BPD Pataruman menjadi saluran utama aspirasi masyarakat melalui rapat resmi maupun jalur informal. Data lapangan menunjukkan bahwa aspirasi mendesak, seperti masalah air bersih atau sampah, segera ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pemerintah desa. Aspirasi jangka panjang, seperti pengembangan pertanian, dimasukkan ke agenda rapat musyawarah berikutnya. Mekanisme ini menunjukkan sistem prioritas yang jelas dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa BPD berfungsi sebagai mediator demokratis yang menjaga hubungan timbal balik dengan masyarakat. Ini relevan dengan dimensi adaptabilitas (Steers, 1985), yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan. Jika penelitian Ramadayanti (2019) menekankan peran BPD dalam pengawasan pembangunan fisik, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa efektivitas juga terkait dengan responsivitas terhadap aspirasi warga. Kontribusi akademiknya adalah memperkuat literatur tentang demokrasi desa: partisipasi tidak sebatas hadir di musyawarah, melainkan juga pada respons cepat terhadap kebutuhan warga.

3. Legislasi dan Pembahasan Peraturan Desa

Dalam fungsi legislasi, BPD Pataruman terlibat aktif membahas Peraturan Desa (Perdes) bersama pemerintah desa. Proses pembahasan tidak hanya formalitas, melainkan juga menyangkut substansi aturan, kejelasan bahasa hukum, serta relevansinya dengan kebutuhan warga. Informan menyebutkan bahwa sebelum rapat formal, BPD kerap berdialog dengan tokoh masyarakat untuk menyerap masukan. Hal ini menjadikan produk hukum desa lebih representatif dan tidak multitafsir.

Makna akademik dari temuan ini adalah bahwa Perdes bukan sekadar dokumen legal, melainkan hasil dari negosiasi sosial-politik lokal. Ini sejalan dengan konsep integrasi sistem (Steers, 1985), yaitu efektivitas organisasi dicapai ketika koordinasi lintas aktor berjalan sinergis. Dibandingkan penelitian Poli (2021) yang fokus pada pengawasan infrastruktur, penelitian ini menambahkan bahwa fungsi legislasi BPD dapat dipahami sebagai arena konsolidasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi

ilmiahnya adalah menekankan bahwa efektivitas kerja BPD dalam legislasi memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat desa.

4. Kontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara keseluruhan, efektivitas kerja BPD Pataruman berkontribusi pada tiga aspek kesejahteraan:

- 1) Infrastruktur dasar – perbaikan jalan, rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta sarana lingkungan.
- 2) Rasa aman dan sosial – keterlibatan dalam penyelesaian konflik kecil, pengawasan distribusi bantuan yang adil, dan menjaga kondusivitas desa.
- 3) Pemberdayaan ekonomi – meskipun belum merata, ada dukungan terhadap petani dan pedagang kecil melalui program desa yang diawasi BPD.

Interpretasi dari hasil ini adalah bahwa efektivitas kerja BPD tidak hanya meningkatkan transparansi pemerintahan desa, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap kualitas hidup warga. Namun, kendala masih ada, seperti distribusi program pertanian yang belum merata dan keterbatasan dokumentasi administrasi. Hal ini mendukung pandangan Robbins & Coulter (2012) bahwa efektivitas organisasi publik baru tercapai bila ada keselarasan antara tujuan, efisiensi sumber daya, dan partisipasi pemangku kepentingan.

5. Makna Akademik dan Praktis

Dari sisi akademik, penelitian ini memperluas kajian efektivitas organisasi publik di tingkat desa. Jika sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti pembangunan fisik semata, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas BPD juga mencakup transparansi, partisipasi, dan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, studi ini mengisi research gap dalam literatur pemerintahan desa yang cenderung mengabaikan dimensi kesejahteraan non-fisik.

Dari sisi praktis, temuan ini menegaskan perlunya:

- 1) Penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan regulasi dan pengawasan.

- 2) Peningkatan sistem dokumentasi agar bukti kerja BPD tersip dengan baik dan bisa dievaluasi.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi (misalnya kanal pengaduan online atau media sosial) untuk memperluas jangkauan penyerapan aspirasi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, efektivitas kerja BPD dapat semakin optimal, sehingga perannya dalam mewujudkan tata kelola desa yang responsif, partisipatif, dan akuntabel semakin nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pataruman telah menjalankan fungsi utamanya secara cukup efektif, terutama dalam pengawasan penggunaan dana desa, penyaluran aspirasi warga, dan pembahasan peraturan desa bersama pemerintah desa. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa efektivitas kerja BPD berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan transparansi program sosial, maupun penguatan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kerangka efektivitas organisasi Steers, yang menekankan dimensi pencapaian tujuan, integrasi sistem, dan adaptabilitas. BPD Pataruman terbukti mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara responsif, menjaga koordinasi dengan pemerintah desa, dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan lingkungan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD, perbaikan sistem dokumentasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar peran BPD semakin optimal dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah lingkungannya terbatas pada satu desa dengan jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua konteks desa. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek ke beberapa desa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, serta mengkaji lebih lanjut peran BPD dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Poli, T. L. S. (2021). *Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kanonangan Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa* [Skripsi sarjana, Universitas Sam Ratulangi]. Universitas Sam Ratulangi.

- Ramadayanti, I. L. (2019). *Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat* [Skripsi sarjana, Universitas Cordova]. Universitas Cordova.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management* (11th ed.). Pearson Education.
- Siregar, U. K. (2018). *Efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.